

EVALUASI KETERSEDIAAN PRASARANA DAN SARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN NELAYAN WILAYAH PESISIR KELURAHAN AMPANA KABUPATEN TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Latupeirissa, Josefine Ernestine¹, Wunas, Shirly² dan Mohammad, Iwan³

¹*Program Studi Teknik Sipil, UKI Paulus Makassar, Jl. Perintis Kemerdekaan KM 13Daya-Makassar
Email: josefine_ernestine@yahoo.com*

²*Program Studi Teknik Sipil, Universitas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10 Makassar*

³*Program Studi Teknik Sipil, Universitas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10 Makassar*

ABSTRAK

Kebutuhan akan prasarana lingkungan dan perumahan pada saat ini tidak saja terbatas pada kebutuhan untuk mempertahankan diri, tetapi juga pada kebutuhan yang lebih tinggi nilainya, antara lain kebutuhan untuk bergaul dengan individu lain, kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri, serta meningkatkan produktifitas kehidupan masyarakat. Oleh karena itu pembangunan prasarana lingkungan permukiman merupakan salah satu hal penting dalam mewujudkan kebutuhan di atas serta kebutuhan akan suatu tempat tinggal yang sehat dan nyaman. Wilayah pesisir Kecamatan Ampana Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah adalah suatu wilayah di mana terdapat suatu komunitas masyarakat nelayan yang tidak dapat dipisahkan dengan ketersediaan fasilitas prasarana dan sarana lingkungan yang mendukung kelangsungan aktifitas dari masyarakat nelayan tersebut. Profil Pengembangan Wisata Bahari Pulau Togeana Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2007 menjelaskan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah mengalami masalah yang sama dengan kota lainnya dalam hal pembangunan permukiman. Kelengkapan infrastruktur lingkungan permukiman masih sangat terbatas sehingga aktifitas dan kenyamanan masyarakat sangat terganggu. Kurangnya ketersediaan prasarana dan sarana dapat dilihat di beberapa permukiman khususnya di wilayah pesisir, seperti : prasarana jalan, air bersih, tempat pembuangan sampah, drainase dan pembuangan air limbah. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi ketersediaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman wilayah pesisir Kelurahan Ampana yang dibangun oleh pemerintah daerah di Kabupaten Tojo Una-Una serta mengevaluasi ketersediaan prasarana dan sarana berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Cipta Karya No.43/KPTS/CK/1999 yang sesuai dengan kondisi fisik lingkungan yang ada. Artikel ini membahas hasil observasi, wawancara dan pendapat dari 55 kepala keluarga yang mewakili 217 KK yang menempati tiga RW di wilayah pesisir kelurahan Ampana. Hasil penelitian menyatakan bahwa ketersediaan prasarana jalan, drainase, persampahan, air bersih dan pembuangan air limbah umumnya masih dikategorikan kurang baik. Ketersediaan sarana penunjang dermaga masih dikategorikan cukup, karena fasilitas dermaga belum mampu menampung kapal dalam jumlah yang banyak, serta lahan yang ada tidak mencapai lima Ha dari luas yang diisyaratkan dalam standar pelabuhan perikanan pantai.

Kata-kata kunci: daerah pesisir pantai, permukiman nelayan, sarana dan prasarana

1. PENDAHULUAN

Prasarana dan sarana merupakan kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan suatu permukiman dapat berfungsi dengan baik. Kebutuhan ini sangat berperan dalam peningkatan stabilitas sosial, dinamika dan produktifitas dari individu atau kelompok masyarakat itu sendiri, walau pada kenyataannya ketersediaan prasarana dan sarana permukiman masih sangat terbatas dan belum secara merata dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Upaya pemerintah untuk menangani masalah tersebut adalah dengan menerbitkan undang – undang tentang Perumahan dan Permukiman nomor. 4 Tahun 1992, Pasal 18 yang menyatakan bahwa proses pembangunan kawasan permukiman ditujukan untuk menciptakan kawasan permukiman yang tersusun atas satuan – satuan lingkungan permukiman, mengintegrasikan secara terpadu dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan yang telah ada di dalam atau disekitarnya. Adapun yang dimaksud dengan satuan lingkungan permukiman dalam pasal

tersebut adalah kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur.

Dalam profil pengembangan wisata bahari pulau Togean kabupaten Tojo Una Tahun 2007, dikemukakan bahwa provinsi Sulawesi Tengah mengalami masalah yang sama dengan kota lainnya dalam hal pembangunan permukiman. Kelengkapan infrastruktur lingkungan permukiman masih sangat terbatas sehingga aktifitas dan kenyamanan masyarakat menjadi terganggu. Kurangnya ketersediaan prasarana dan sarana dapat dilihat di beberapa permukiman khususnya yang ada di wilayah pesisir kecamatan Ampana, seperti : prasarana jalan, air bersih, tempat pembuangan sampah, drainase dan pembuangan air limbah.

Ampana Kota secara administratif berada dalam wilayah kecamatan ampana kabupaten tojo una-una yang terletak di antara 90° lintang utara dan 10° lintang selatan, serta 121° .25° bujur barat. Dengan batas wilayah sebelah Utara, perairan teluk Tomini, sebelah Selatan, wilayah kecamatan Ulubongka, sebelah Timur, wilayah kecamatan Ampana Tete, dan sebelah Barat wilayah kecamatan Ulubongka. Luas wilayah kecamatan Ampana kota 237,30 km² atau 23,730 ha dengan rincian, permukaan daratan 75,91 persen, perbukitan 10,91 persen dan pegunungan 13,18 persen. Enam desa/kelurahan berada pada ketinggian antara 0-5 meter dari permukaan laut dan lima desa lainnya dengan ketinggian antara 6-18 meter dari permukaan laut. Wilayah kecamatan Ampana Kota dipengaruhi oleh dua musim secara tetap yaitu musim Barat dan musim Timur .

Berdasarkan hasil registrasi penduduk kecamatan Ampana Kota pada akhir Tahun 2008 adalah 34.187 jiwa yang terdiri dari 16.915 laki-laki dan 17.272 perempuan dengan jumlah kepala keluarga 9.182 KK dengan kepadatan penduduk per kilometer persegi seperti yang disajikan pada Tabel 1 berikut ini :

Tabel 1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Ampana Tahun 2008

<i>Wilayah</i>	<i>Jumlah penduduk Tahun 2008</i>	<i>Rata-rata Kepadatan per Km2(jiwa)</i>
Kelurahan Sansarino	2.608	44
Kelurahan Malotong	3.281	47
Kelurahan Bailo	2.908	1,08
Kelurahan Ampana	3.944	415
Kelurahan Uentanaga Atas	5.338	181
Kelurahan Sumoli	2.385	291
Kelurahan Uentanaga Bawah	3.796	3,80
Kelurahan Dondo	4.271	321
Kelurahan Labuan	1.881	437
Kelurahan Padang Tumbuo	1.627	52
Kelurahan Toba	2.148	286
Jumlah	34.187	144

(Sumber : Badan Pusat Statistik Kab.Tojo Una Una, 2008)

Tabel 1 di atas memperlihatkan bahwa kepadatan penduduk rata-rata adalah 144 jiwa/km². Kelurahan yang paling padat penduduknya adalah Kelurahan Labuan dengan kepadatan penduduk 437 jiwa/km² dan yang paling jarang adalah Kelurahan Bailo dengan kepadatan 1,08 jiwa/km².

Penelitian dilakukan pada Wilayah Pesisir Kelurahan Ampana yang merupakan bagian dari Kecamatan Ampana Kabupaten Tojo Una Una. Kelurahan Ampana secara keseluruhan memiliki luas wilayah 9,50 km² yang terdiri dari empat RW yaitu : RW I, RW II dan RW III terletak di wilayah Pesisir bagian Barat dengan luas 7,95 km² sedangkan RW IV terletak di wilayah bagian Selatan dengan luas 1,55 km². Panjang garis pantai pesisir Kabupaten Tojo Una Una sekitar 420 km. Daerah permukiman nelayan berada sekitar 53 km dari panjang garis pantai yang ada. Pertumbuhan penduduk dalam periode waktu tertentu yang jumlahnya juga dipengaruhi oleh para migran, merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap pemenuhan ketersediaan prasarana dan sarana wilayah.

Salah satu isu yang berkembang di wilayah pesisir kecamatan Ampana adalah kondisi sanitasi permukiman yang belum memadai. Umumnya masyarakat masih menggunakan pantai sebagai tempat pembuangan limbah, hal ini disebabkan pemahaman masyarakat yang masih sangat rendah terhadap pentingnya sanitasi. Fenomena lain adalah belum adanya penanganan yang baik terhadap masalah persampahan, sehingga masyarakat masih sering membuang sampah ke laut atau diletakkan di tepian pantai. Hal ini menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, misalnya : menurunkan kualitas lingkungan, mengganggu estetika lingkungan, dan yang lebih berbahaya lagi dapat menjadi

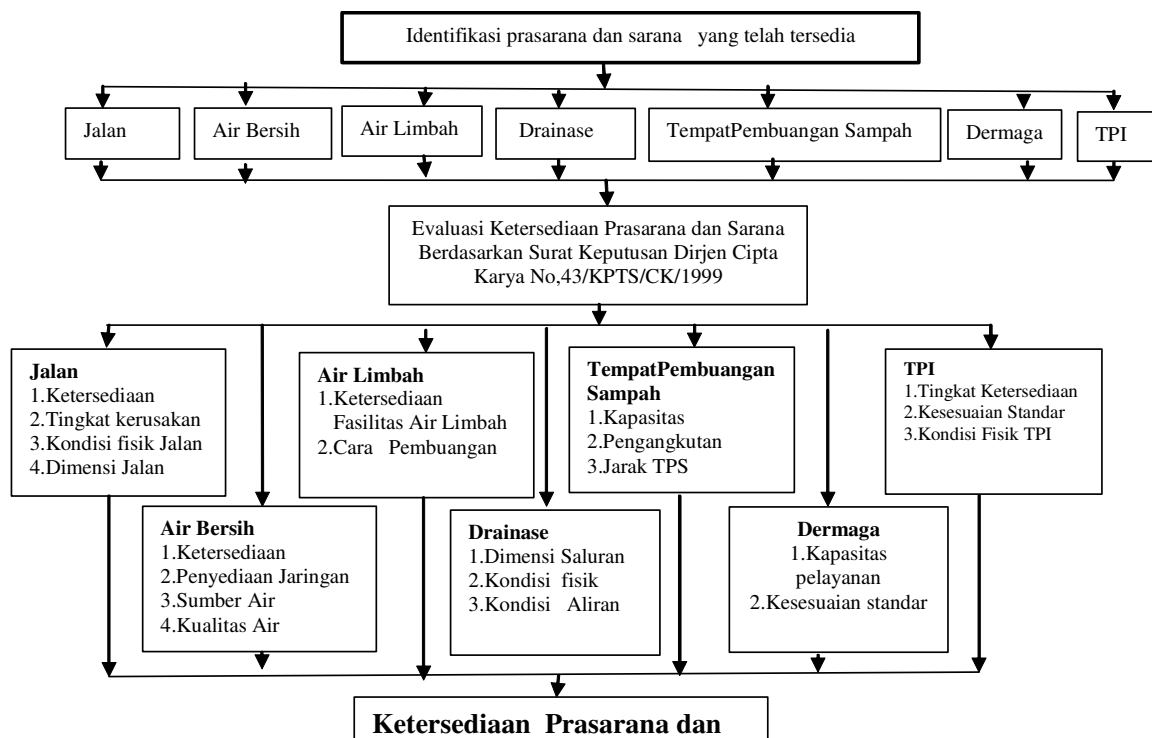
sumber penyakit bagi masyarakat setempat. Di samping itu sarana air bersih dari Jaringan Pengembangan Sosial (JPS) yang telah dibangun, kualitas airnya belum memenuhi standar minimum kebutuhan air bersih.

Dalam penelitian ini digunakan standar yang khusus untuk permukiman nelayan karena masyarakat nelayan memiliki karakteristik tersendiri dan lingkungan fisiknya berbeda dengan yang ada di daratan. Standar yang digunakan dalam evaluasi kawasan permukiman nelayan antara lain : Surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya No.43/ KPTS/ CK/ 1999, Tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Perumahan Nelayan (PU Cipta Karya,1999), Undang Undang No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman, Pedoman Teknis Pembangunan Perumahan dan Permukiman Desa (P3D) Nelayan (PU Cipta Karya,1989). Bertolak dari standar yang ada, selayaknya daerah permukiman nelayan memiliki prasarana dan sarana yang dapat menunjang kegiatan masyarakat seperti : jaringan jalan, fasilitas air bersih, saluran air limbah, serta angkutan sampah dan drainase yang memadai sehingga tercipta lingkungan permukiman yang sehat, nyaman, dan teratur. Oleh karena itu diperlukan evaluasi terhadap ketersediaan prasarana dan sarana yang dapat menunjang kehidupan masyarakat nelayan. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan suatu penelitian yang berkenaan dengan masalah ketersediaan prasarana dan sarana di Kelurahan Ampana Kabupaten Tojo Una Una.

2. TUJUAN PENELITIAN

Mengidentifikasi ketersediaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman wilayah pesisir kelurahan Ampana yang dibangun oleh pemerintah daerah di kabupaten Tojo Una-Una propinsi Sulawesi Tengah serta mengevaluasi ketersediaan prasarana dan sarana tersebut berdasarkan surat keputusan Dirjen Cipta Karya No,43/KPTS/CK/1999 yang sesuai dengan kondisi fisik di lingkungan ini.

3. DESAIN PENELITIAN



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah pesisir Kelurahan Ampana Kabupaten Tojo Una Una Propinsi Sulawesi Tengah sejak bulan Februari 2010 sampai dengan bulan April 2010. Populasi dalam penelitian ini adalah kepala keluarga berjumlah 217 yang menempati 3 RW di wilayah pesisir tersebut dengan jumlah sampel 55 kepala keluarga seperti dijabarkan pada Tabel 2. berikut ini :

Tabel 2. Jumlah Sampel yang dipergunakan

No	Wilayah	Jumlah KK	Jumlah Sampel
1	RW I	7	18
2	RW II	84	21
3	RW III	62	16

Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lokasi penelitian, wawancara dengan masyarakat setempat serta pengambilan data sekunder. Sedangkan indikator pengukurannya terdiri atas :

- a. Jaringan Jalan, yang mana penilaian dilihat dari :
 - Ada atau tidaknya prasarana jalan bagi permukiman, dinilai dari kerusakan akibat genangan air, dan retak.
 - Kondisi fisik jalan, dinilai dari kondisi perkerasan aspal dan *paving block*.
 - Dimensi jalan, dinilai dari kesesuaian terhadap standar jalan lingkungan dan jalan setapak.
- b. Air bersih, yang mana penilaian dilihat dari :
 - Penyediaan jaringan air bersih dari JPS, dinilai dari jumlah sambungan untuk setiap hunian.
 - Sumber air bersih yang digunakan, dinilai dari cara memperoleh air JPS dan sumur gali.
 - Tingkat kualitas air bersih, dinilai dari warna air, rasa dan bau.
- c. Drainase, yang mana penilaian dilihat dari:
 - Dimensi saluran , dinilai dari kesesuaian terhadap standar.
 - Kondisi fisik saluran, dinilai dari tingkat kerusakan saluran.
 - Kondisi pengaliran, dinilai dari jumlah genangan, endapan pada saluran.
- d. Pembuangan sampah, yang mana penilaian dilihat dari :
 - Kapasitas pembuangan sampah rumah tangga, dinilai dari kemampuan penampungan tempat pembuangan sampah rumah tangga.
 - Cara pengangkutan sampah, dinilai dari pembuangan yang ditangani sendiri dan diangkut gerobak oleh petugas.
 - Jarak pencapaian ke TPS, dinilai dari jarak standar 50 m.
- e. Air limbah, yang mana penilaian dilihat dari :
 - Cara masyarakat membuang limbah, dinilai dari pembuangan limbah dilaut, sitem cubluk, dan MCK.
 - Tingkat ketersediaan fasilitas limbah, dinilai dari jumlah kepemilikan jamban dan MCK komunal.
 - Tingkat pencemaran lingkungan, dinilai dari pembuangan limbah rumah tangga dan pembuangan tinja yang menggunakan pantai sebagai pembuangan Limbah.
- f. Dermaga, yang mana penilaian dilihat dari:
 - Kapasitas pelayanan penampungan kapal perikanan, dinilai terhadap jumlah perahu nelayan yang berlabuh.
 - Kondisi fisik dermaga, dinilai terhadap tingkat kerusakan
 - Dimensi Dermaga, dinilai kesesuaian terhadap standar
- g. Tempat Pelelangan Ikan, yang mana penilaian dilihat dari:
 - Kapasitas penampungan ikan, dinilai terhadap jumlah tampungan ikan yang masuk dari nelayan.
 - Jarak pencapaian ke TPI, dinilai kesesuaian terhadap standar
 - Ukuran lahan TPI, dinilai kesesuaian terhadap standar

Penentuan tingkat ketersediaan prasarana lingkungan didasarkan pada Tabel interpretasi oleh Hadi dalam Arikunto (2002), dengan penilaian baik, cukup, dan kurang. Dengan demikian kategori tingkat ketersediaan prasarana yang ada ditentukan sebagai berikut :

- a. Kondisi baik, jika presentase antara 80% - 100% tingkat ketersediaan terhadap indikator penilaiannya.
- b. Kondisi cukup, jika presentase antara 60% - 79% tingkat ketersediaan terhadap indikator penilaiannya.
- c. Kondisi kurang, jika presentase adalah $\leq 59\%$ tingkat ketersediaan terhadap indikator penilaiannya.

4. EVALUASI KETERSEDIAAN PRASARANA LINGKUNGAN WILAYAH PESISIR

Penyediaan prasarana dan sarana pada kelurahan Ampana, pada dasarnya dimaksudkan untuk mewujudkan kawasan permukiman yang sehat, serasi, teratur, serta dapat mendukung aktifitas masyarakat sehari-hari. Hasil evaluasi berdasarkan analisis menyatakan bahwa :

1. Ketersediaan Prasarana jalan

Jaringan jalan yang ada di wilayah pesisir kelurahan Ampana, pada umumnya sudah tersedia dan tersusun secara hirarki mulai jalan setapak yang dihubungkan dengan jalan lingkungan, dan jalan lingkungan yang menghubungkan dengan jalan kolektor sekunder yang ada dipermukiman wilayah pesisir kelurahan Ampana dengan kawasan permukiman lainnya. Panjang jalan yang ada sangat bervariasi dengan panjang total jalan yang telah terbangun

adalah sepanjang 7.218 meter dengan jumlah ruas 24 yang tersebar di tiga RW yang ada di wilayah pesisir Ampana. Panjang jalan yang telah terbangun dapat dilihat pada Tabel 3. berikut ini :

Tabel 3. Distribusi jumlah panjang jalan di Kelurahan Ampana

No	Wilayah	Luas Wilayah (KM2)	Jumlah Ruas Jalan (Jalur)	Panjang Jalan (M)
1	RW I	2,80	8	2.778
2	RW II	2,15	9	1.840
3	RW III	3,00	7	2.600
Total		7,95	24	7.218

Untuk mengetahui ketersediaan prasarana jalan maka penilaian akan dilakukan terhadap: a. Kondisi fisik permukaan jalan b. Kesesuaian dimensi jalan c. tingkat ketersediaan jalan

a. Kondisi fisik permukaan jalan

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi permukaan jalan di kelurahan Ampana , maka penilaian terhadap tingkat ketersediaan jalan secara kualitas hanya ditinjau terhadap kondisi permukaan jalan. Penilaian dilakukan pada masing-masing stasiun pengukuran yang sesuai panjang sampel dan jumlah titik.

Dari hasil penilaian terhadap kondisi permukaan jalan di Kelurahan Ampana secara umum memperlihatkan tingkat ketersediaan masih **kurang baik**, hal ini disebabkan persentase kondisi permukaan jalan yang ada di kelurahan Ampana hanya mencapai 53,3% dari keseluruhan panjang jalan lapisan permukaannya beraspal. Hal ini berarti bahwa ruas jalan yang mendapatkan pengaspalan masih sebahagian kecil bahkan masih ada ruas jalan yang sama sekali belum dilakukan pengaspalan. Tabel 4 memperlihatkan secara lebih jelas kondisi permukaan jalan yang ada di Kelurahan Ampana.

Tabel 4. Kondisi Permukaan Jalan di Kelurahan Ampana

No	Wilayah (RW)	Kondisi Permukaan Jalan			
		Aspal	Kerikil	Tanah	Paving Block
1	RW.1	86,6	6,6	13,3	20
2	RW.2	31,6	47,3	10,5	10,5
3	RW.3	42,1	26,3	26,3	10,5
Total		160,3	43,4	50,1	41
Persentase Rata-Rata (%)		53,3	14,3	16,7	13,66
Kategori Prasarana		Kurang Baik			

b. Kesesuaian dimensi badan jalan

Berdasarkan hasil analisis terhadap dimensi badan jalan di kelurahan Ampana maka penilaian terhadap tingkat ketersediaan prasarana jalan yang terdapat di kelurahan Ampana berdasarkan kesesuaian dimensi masing-masing ruas jalan yang telah terbangun adalah **cukup baik** hal ini dengan melihat kesesuaian kondisi jalan dengan penilaian baik dari aspek lebar badan jalan, lebar perkerasan, sementara untuk penilaian terhadap lebar bahu jalan dikategorikan **kurang baik** hal ini dapat dilihat dengan persentase penilaian adalah untuk lebar badan jalan mencapai 92,63%, sementara lebar perkerasan 82,3%, dan lebar bahu jalan mencapai 66,6 % dikategorikan kurang.

Untuk melihat kesesuaian dimensi badan jalan sesuai jumlah ruas yang ada di kelurahan Ampana terhadap standar dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini :

Tabel 5. Kesesuaian Dimensi Badan Jalan Kelurahan Ampana

Wilayah	Kesesuaian Dengan Standar Perencanaan											
	Lebar Badan Jalan				Lebar Perkerasan				Lebar Bahu Jalan			
	Sesuai Standar		Tidak Sesuai		Sesuai Standar		Tidak Sesuai		Sesuai Standar		Tidak Sesuai	
	J.Rua (N)	%	J.Ruas (N)	%	J.Ruas (N)	%	J.Ruas (N)	%	J.Ruas (N)	%	J.Ruas (N)	%
RW.1	8	100	0	0	6	75	2	25	0	0	0	0,00
RW.2	7	77,8	2	22,2	9	100	0	0	0	0	9	100
RW.3	7	100	0	0	5	71,4	2	28,57	0	0	7	100
Total	22	277,8	2	22,2	20	246,4	4	53,57	0	0	16	200
Persentase Rata-Rata	92,63		7,4		82,3		17,8		0		66,6	
Kategori Prasarana	baik				Kondisi Baik				Kurang Baik			

2. Ketersediaan Prasarana Drainase

Prasarana drainase pada suatu lingkungan permukiman merupakan persyaratan mutlak yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah guna mendukung keberlangsungan kehidupan dalam wilayah tersebut. Kurangnya ketersediaan saluran drainase di lingkungan permukiman akan mengakibatkan terjadi genangan air, oleh karena itu ketersediaan saluran drainase sangat mutlak disediakan disetiap lingkungan permukiman. Penilaian ketersediaan prasarana drainase di wilayah pesisir kelurahan Ampana meliputi: a. Dimensi saluran, b. Kondisi fisik bangunan drainase, c. Kondisi aliran drainase.

a. Dimensi saluran

Berdasarkan analisis terhadap dimensi saluran yang ada di kelurahan Ampana, tingkat penilaian prasarana drainase terhadap dimensi saluran yang ada di kelurahan Ampana dapat dikategorikan **cukup baik** karena ketersediaan dimensi rata-rata mencapai 71,6% sedangkan yang tidak memenuhi dimensi saluran mencapai 28,3%. Selengkapnya disajikan pada Tabel 6. berikut ini :

Tabel 6. Kondisi dimensi saluran drainase kelurahan Ampana

No	Wilayah	Panjang Saluran	Kondisi Dimensi Saluran			
		(M)	Lebar Saluran		Kedalaman Saluran	
			Memenuhi (%)	Tidak Memenuhi (%)	Memenuhi (%)	Tidak Memenuhi (%)
1	RW.1	2110	62,5	37,5	62,5	37,5
2	RW.2	1870	66,6	33,3	66,6	33,3
3	RW.3	1780	85,7	14,2	85,7	14,2
Total		5760	214,8	85	214,8	85
Persentase rata-rata			71,6	28,3	71,6	28,3
Kategori Prasarana			Cukup		Cukup	

b. Kondisi fisik bangunan drainase

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi fisik bangunan drainase di kelurahan Ampana, maka kondisi penilaian ketersediaan prasarana drainase dapat dikategorikan **kurang baik**. Kondisi fisik bangunan dengan kategori baik hanya mencapai 44,8% sementara kondisi dengan kategori rusak mencapai 54,9%. Terjadinya genangan air disebabkan kondisi bangunan yang tidak sesuai standard.. Gambaran mengenai kondisi bangunan drainase di kelurahan Ampana dapat dilihat pada Tabel 7. berikut ini.

Tabel 7. Kondisi Fisik Bangunan Drainase Kelurahan Ampana

Wilayah	Kondisi Bangunan Drainase %	
	Baik	Rusak
RW.1	53,3	53,3
RW.2	60,5	26,6
RW.3	16,6	83,3
Total	129,9	163,2
Persentase rata-rata	44,8	54,9
Kategori Prasarana	Kondisi Kurang	

3. Ketersediaan Prasarana Persampahan

Pengolahan sampah dalam suatu kawasan permukiman merupakan hal yang sangat penting, karena sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat merusak lingkungan, menurunkan estetika lingkungan dan menjadi sumber penyakit bagi lingkungan masyarakat. Dari hasil analisis ditemukan sekitar 27,28% masyarakat pesisir membuang sampah ke tepian pantai atau langsung ke laut, sementara masyarakat yang membuang sampah ke tempatnya hanya sekitar 45,4%. Sedangkan yang membuang sampahnya dengan cara dibakar sekitar 25,45%, selebihnya 1,81% membuang sampahnya langsung ke TPA. Kondisi di atas diperlihatkan pada Tabel 8. berikut ini.

Tabel 8. Cara Pembuangan Sampah Masyarakat di Kelurahan Ampana

No	Wilayah	Jumlah Sampel	Cara Pembuangan Sampah Masyarakat				Total
			Dibuang ketempat sampah	Dibakar	Dibuang kelaut	Lainnya	
1	RW.1	18	8	6	4	0	18
2	RW.2	21	10	6	5	0	21
3	RW.3	16	7	2	6	1	16
Total		55	25	14	15	1	55
Persentasi rata-rata			45,45	25,45	27,28	1,88	100

a. Kesesuaian kapasitas tempat sampah rumah tangga dengan standar perencanaan

Berdasarkan hasil analisis terhadap kesesuaian kapasitas tempat sampah rumah tangga di kelurahan Ampana, maka penilaian tingkat ketersediaan prasarana persampahan rumah tangga dapat dikategorikan **kurang baik**. Hal ini disebabkan kapasitas tempat pembuangan sampah rumah tangga yang memenuhi syarat untuk 2,5 liter/orang/hari hanya 48,2%. Hal ini menggambarkan bahwa ketersediaan tempat sampah rumah tangga masih sangat kurang sehingga banyak masyarakat yang membuang sampahnya langsung kelaut atau ke tepian pantai.

Bila ditinjau dari segi wilayah, ketersediaan tempat pembuangan sampah rumah tangga yang dapat dikategorikan cukup memadai hanya di lingkungan RW.3 yaitu mencapai 61,6% sementara wilayah lainnya masih kurang. Untuk mengetahui kondisi kesesuaian kapasitas tempat sampah rumah tangga yang ada di Kelurahan Ampana dengan standar perencanaan, dapat dilihat pada Tabel 9 berikut ini.

Tabel 9. Kesesuaian kapasitas tempat pembuangan sampah rumah tangga di wilayah pesisir Kelurahan Ampana

No	Wilayah	Jumlah Sampel	Jumlah Penghuni	Kesesuaian dengan Standar	
				Terpenuhi (%)	Tidak (%)
1	RW.1	18	86	33,3	71,4
2	RW.2	21	98	50	50
3	RW.3	16	82	61,6	38,9
Total		55	266	144,9	160,3
Persentasi rata-rata				48,2	52,4
<i>Kategori Penilaian</i>				Kurang	Kurang

b. Kesesuaian jarak hunian ke TPS dengan standard dan cara pengangkutan

Ketersediaan prasarana sampah berdasarkan jarak ke tempat pembuangan sampah komunal (TPS) di kelurahan Ampana dapat dikategori **kurang** disebabkan jarak rata-rata mencapai 63,34% . Berdasarkan observasi dilapangan jarak pembuangan ke TPS tidak sesuai standar, sehingga masyarakat memilih alternatif membuang sampah langsung kelaut. Bila ditinjau dari wilayah di Kelurahan Ampana yang dikategorikan cukup memenuhi standar perencanaan dari segi penyediaan TPS adalah RW.3 mencapai 64,10% seperti yang disajikan pada Tabel 10 berikut ini.

Tabel 10. Kondisi jarak hunian ke TPS Kelurahan Ampana

No	Wilayah	Jumlah Sampel	Kesesuaian Dengan Standar Perencanaan (Max 150M)	
			Terpenuhi (%)	Tidak (%)
1		18	62,74	32,12
2		21	51,2	55,67
3		16	64,10	100
Total		55	178,04	176,79
Persentase rata-rata			59,34	40,66
<i>Kategori Pilihan</i>			Cukup	Kurang

4. Ketersediaan prasarana air bersih

Air bersih merupakan kebutuhan manusia yang paling vital. Setiap hari manusia memerlukan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti: air minum, memasak, mandi, mencuci dan sebagainya. Oleh karena itu ketersediaan prasarana dan sarana air bersih mutlak harus disediakan dalam suatu lingkungan kawasan permukiman. Hasil penelitian menyatakan bahwa pemanfaatan air bersih oleh masyarakat sebagian besar memanfaatkan jaringan Penanganan Sosial (JPS) yang telah ada. Ketersediaan prasarana air bersih meliputi : a. penyediaan jaringan melalui jumlah sambungan rumah, b. Kualitas air bersih, c. Kapasitas air bersih yang dihasilkan oleh Jaringan Penanganan Sosial (JPS).

a. Penyediaan jaringan air bersih melalui jumlah sambungan rumah

Tingkat ketersediaan prasarana air bersih berdasarkan penggunaan sambungan rumah melalui JPS pada Kelurahan Ampana secara umum dikategorikan **cukup** karena mencapai 61,3 %.. Dari hasil analisis diperoleh, wilayah yang menggunakan jaringan JPS terbanyak adalah RW.2 yang mencapai 66,2%.

Secara rinci penggunaan air bersih di kelurahan Ampana dapat disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Penyediaan jaringan Air bersih JPS melalui jumlah sambungan rumah tangga

No.	Wilayah	Jumlah Sampel	Jumlah penghuni	Jumlah Sambungan (JPS)	%
1	RW.1	18	86	11	61,1
2	RW.2	21	98	14	66,6
3	RW.3	16	82	9	56,2
	Total	55	266		183,9
Presentase rata-rata					61,3
Kategori penilaian				baik	

b.Kualitas air bersih

- Penilaian kualitas air terhadap warna

Penilaian ketersediaan prasarana air bersih ditinjau berdasarkan kualitas air yang bersumber dari JPS, adalah tingkat ketersediaan secara umum dikategorikan cukup karena mencapai 75,3 % dari ketersediaan air bersih dalam kondisi bening, sementara kondisi keruh mencapai 24,3%

Tabel 12. Kualitas warna air bersih (JPS) di Kelurahan Ampana

Wilayah	Jumlah Sampel	Jumlah Sampel Pengguna	Kualitas Warna			
			Bening (N)	%	Keruh (N)	%
RW.1	18	11	9	81,8	2	18,1
RW.2	21	14	11	78,5	3	21,4
RW.3	16	9	6	66,6	3	33,3
Total	55	44		226,9		72,8
Persentase rata-rata				75,7		24,3
Kategori Pilihan			Cukup			

- Penilaian kualitas air terhadap rasa

Berdasarkan analisa penyediaan air bersih JPS yang didasarkan terhadap kualitas rasa dikategorikan **kurang baik** karena hanya mencapai 57,5% dari ketersediaan air yang tidak mempunyai rasa, sementara air yang berasa mencapai 42,5%. Kualitas air bersih di kelurahan Ampana diperlihatkan pada Tabel 13. berikut ini.

Tabel 13. Kualitas rasa air bersih (JPS) di Kelurahan Ampana

Wilayah	Jumlah Sampel	Jumlah Sampel Pengguna	Kualitas Rasa Air			
			Berasa (N)	%	Tdk Berasa (N)	%
RW.1	18	11	4	36,4	7	63,6
RW.2	21	14	5	35,7	9	64,2
RW.3	16	9	5	55,6	4	44,5
Total	55	44		127,7		172,3
Persentase rata-rata				42,5		57,5
Kategori Pilihan			Kurang			

-Penilaian kualitas air terhadap bau

Dari hasil analisis terhadap tingkat kualitas air bersih yang bersumber dari JPS di Kelurahan Ampana dikategorikan kurang baik karena kualitas rasa terhadap bau mencapai 56,4% sementara yang tidak berbau mencapai 43,6%. Selengkapnya disajikan pada Tabel 14 berikut ini :

Tabel 14. Kualitas rasa air bersih (JPS) di Kelurahan Ampana

Wilayah	Jumlah Sampel	Jumlah Sampel Pengguna	Kualitas Bau air			
			Tdk Berbau (N)	%	Berbau (N)	%
RW.1	18	11	2	18,2	9	81,8
RW.2	21	14	8	57,2	6	42,8
RW.3	16	9	5	55,5	4	44,4
Total	55	44		130,9		169
Persentase rata-rata				43,6		56,4
Kategori Pilihan				Kurang		

-Penilaian kapasitas air bersih berdasarkan jumlah pemakaian

Berdasarkan hasil analisis terhadap kapasitas air bersih berdasarkan jumlah pemakaian masyarakat wilayah pesisir kelurahan Ampana, maka penilaian ketersediaan air bersih yang didasarkan pada kapasitas air JPS, dapat dikategorikan **cukup baik** dengan pencapaian 72,85% dari kesesuaian terhadap standar perencanaan, sementara 27,15% tidak memenuhi seperti dipaparkan pada Tabel 15.

Tabel 15. Kapasitas air bersih berdasarkan jumlah pemakaian air bersih

Wilayah	Jumlah Sampel Pengguna (Jiwa)	Pemakaian Air Bersih Perbulan	Jumlah Penghuni	Kesesuaian dengan standar	
				Terpenuhi	Tdk Terpenuhi
RW.1	11	404,2	86	61,1	38,9
RW.2	17	456,7	98	76,19	23,8
RW.3	16	345	82	81,2	18,75
Total	44	1205	266	218,4	81,45
Presentasi rata-rata				72,85	27,15
Kategori Penilaian				Cukup	Kurang

5. Ketersediaan prasarana air limbah

Air limbah rumah tangga adalah semua air limbah yang berasal dari kamar mandi, kakus, dapur, tempat cuci pakaian dan peralatan rumah tangga lainnya. Air limbah rumah tangga banyak mengandung bahan organik baik padat maupun cair, garam, lemak, dan bakteri (Coli). Air limbah rumah tangga merupakan salah satu sumber pencemaran lingkungan oleh karena itu harus diperhatikan penanganan dan pengaturan pembuangannya. Analisis meliputi: a. tingkat ketersediaan b. cara pembuangan limbah.

a. Tingkat ketersediaan prasarana limbah

Pada kawasan permukiman nelayan wilayah pesisir, sebagian besar masyarakat belum memiliki jamban keluarga. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman terhadap akibat dari pencemaran limbah, sehingga masih ada masyarakat yang menggunakan tepian pantai untuk membuang tinja. Berdasarkan analisis ketersediaan prasarana limbah rumah tangga di kelurahan Ampana dapat dikategorikan **kurang** baik karena hanya 52,3% masyarakat yang memiliki jamban, seperti yang diperlihatkan pada Tabel 16 berikut ini.

Tabel 16. Ketersediaan Prasarana limbah di Kelurahan Ampana

No	Wilayah	Jumlah Sampel Pengguna	Jumlah Penghuni	Jumlah Pemilikan Jamban	%
1	RW.1	11	86	6	54,5
2	RW.2	17	98	9	52,9
3	RW.3	16	82	8	50
Total		44	266		156,9
Persentase rata - rata					52,3
Kategori Pilihan					Kurang

b. Cara pembuang limbah

Berdasarkan analisa yang diperoleh maka cara pembuangan limbah di kelurahan Ampana dapat dikategorikan **kurang baik** karena masyarakat yang membuang limbahnya ke laut mencapai 57,8% sementara yang menggunakan MCK umum mencapai 42,2%. Ini menunjukkan ketersediaan prasarana limbah di kelurahan Ampana masih sangat terbatas. Untuk lebih rinci cara pembuangan limbah di Kelurahan Ampana dapat dilihat pada Tabel 17 berikut ini :

Tabel 17. Cara Pembuangan limbah di Kelurahan Ampana

No	Wilayah	Jumlah Sampel	Cara Pembuangan Limbah			
			dibuang kelaut	%	MCK	%
1	RW.1	11	5	45,5	6	54,4
2	RW.2	17	9	52,9	8	47
3	RW.3	16	12	75	4	25
Total		44		173,4		126,4
Persentase rata-rata				57,8		42,2
Penilaian				Kurang		Kurang

6. Ketersediaan prasarana penunjang (Dermaga)

Dermaga merupakan fasilitas yang digunakan untuk merapatkan dan menambatkan kapal yang melakukan berbagai kegiatan, seperti bongkar muat (hasil tangkapan ikan), pengisian bahan bakar dan menunggu selama dermaga sedang penuh. Ketersediaan prasarana dermaga di Kelurahan Ampana berdasarkan hasil observasi di lapangan secara umum menunjukkan kategori **cukup baik** karena kesesuaian kondisi dimensi dermaga terhadap standar perencanaan didasarkan pada ukuran kapal yang bertambat, jumlah kapal dan waktu yang diperlukan mencapai 63,4%. Kebutuhan masyarakat terhadap prasarana penunjang seperti dermaga sebagai tempat bongkar muat hasil tangkapan menunjukkan tingginya penggunaan dermaga sebagai tempat untuk menambatkan perahunya.

5. KESIMPULAN

Ketersediaan prasarana yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una Una khususnya di Kelurahan Ampana yang mana merupakan pusat permukiman kota, pada umumnya masih dikategorikan kurang baik, karena terdapat beberapa prasarana dari hasil evaluasi berada pada kategori kurang antara lain:

- Prasarana jalan, berdasarkan hasil analisis kondisi permukaan jalan beraspal menyatakan bahwa hampir sebahagian dari jumlah panjang jalan yang ada di Kelurahan Ampana belum teraspal.
- Prasarana drainase, berdasarkan hasil analisis menunjukkan tingkat ketersediaan khususnya kondisi fisik bangunan drainase masih dalam kategori kurang baik.
- Prasarana persampahan, berdasarkan hasil analisis menunjukkan ketersediaan tempat penampungan sampah rumah tangga dan jarak TPS belum memadai dan belum sesuai standar perencanaan sehingga masyarakat mengambil jalan alternatif untuk membuang sampahnya ke laut
- Prasarana air bersih, di mana kualitas air bersih yang bersumber dari Jaringan Penanganan Sosial masih kurang, baik kualitas dari rasa, warna dan bau.

- e. Ketersediaan sarana penunjang dermaga masih dikategorikan cukup, hal ini disebabkan tingkat ketersediaan fasilitas dermaga belum mampu menampung kapal dalam jumlah yang banyak, serta lahan yang ada tidak mencapai 5 Ha dari luas yang diisyaratkan dalam standar pelabuhan perikanan pantai.

Berdasarkan hal-hal di atas maka perlu dilakukan peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana dilingkungan wilayah Pesisir khususnya di kelurahan Ampana.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Firman B dan Sirait, Martin S. 1990. *“Perencanaan dan evaluasi suatu Sistem untuk proyek pembangunan”*, PT. Bineka Aksara, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Cipta Karya, 1986. *Kepmen PU.No 20/KPTS/1986 Tentang Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun*, Jakarta. Departemen Pekerjaan Umum.
- Departemen Permukiman dan Pembangunan Wilayah, 2000. *SPM Bidang Permukiman dan Pengembangan Wilayah*, Jakarta.
- Iksan, 2000, *“Strategi Pengembangan Prasarana Perkotaan di Indonesia”*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Sunulingga, 1999, *“Pembangunan Tinja Regional dan Lokal, Pustaka Sinar”*, Harapan, Jakarta.
- Soeparman dan Suparmin. 2002. *“Pembangunan Tinja dan Limbah cair”*. Penerbit Buku Kedokteran. Jakarta.
- Kaiser, E. 1979. *Urban Land Use Planning*, University of Illinois Press, Urban and Chicago.
- Danuri, R. Dkk. 2001. *Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan secara terpadu*. Jakarta.
- Suhandjaja, A. 2002. *Pengantar Perencanaan Prasarana Bidang Pekerjaan Umum*.
- Supangat, A. 2007. *Statistik Dalam Kajian Deskriptif Inferensi, dan Nonparametrik*. Jakarta.
- Cochran, W.G. (2005). *Teknik Penarikan Sampel*. Edisi ke Tiga. Universitas Indonesia.
- Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Perhubungan No 493 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan Sebagai Prasarana Perikanan*. Menteri Pertanian dan Menteri Perhubungan Jakarta.